

Pemkab Lebak Gencar Sosialisasi Cegah TPPO

LEBAK (IM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak Banten, gencar melakukan sosialisasi guna menekan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pekerja migran di daerah itu.

"Kita tahun ini belum menerima adanya laporan korban TPPO," kata Kepala Bidang Penempatan Perluasan dan Pelatihan Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lebak, Deni Triasih di Lebak, Senin (6/11).

Pemerintah daerah memperketat para pekerja migran agar tidak terjerat kasus TPPO dengan berkoordinasi dengan pihak lain, seperti kepolisian, stakeholder dan Kementerian Tenaga Kerja.

Para tenaga kerja migran itu bekerja sebagai perawat bayi, lansia, salon aksesoris kendaraan, penjaga toko, pabrik, pembengkelan dan asisten rumah tangga. Pendidikan mereka dari tingkat SD sampai SMA.

Sementara itu, Juleha (25), warga Kalanganyar Kabupaten Lebak mengatakan dirinya bekerja di negara Taiwan sebagai perawat lansia dengan kontrak kerja selama 2 tahun. ●pra

Disporabudpar Kab. Tangerang Bakal Bangun Tempat Wisata

TANGERANG (IM) - Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Tangerang telah merencanakan pembangunan pariwisata, untuk menaikkan ekonomi yang menurun semenjak pandemi Covid-19.

Kepala Bidang (Kabud) Budaya dan Pariwisata pada Disporabudpar Kabupaten Tangerang, Imam Subekhi mengatakan Detail Engineering Desain (DED) untuk memajukan pariwisata itu sudah direncanakan sejak 2016.

Tetapi soal keputusan untuk realisasinya bukan ada di pihaknya, tetapi di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) sesuai dengan prioritas.

"Dengan pariwisata di Kabupaten Tangerang yang begitu kaya, kita juga

pastinya ingin seperti dahulu (sebelum pandemi)," ucap Imam, Senin (6/11).

Imam menyebutkan, wisata yang terdata di pihaknya itu ada banyak, mulai dari wisata alam, wisata religi hingga wisata buatan.

"Jadi banyak, tetapi yang dikelola oleh Pemkab itu hanya di Mangrove Ketapang," katanya.

Menurutnya, dalam rencana tersebut ada pembangunan yang telah diajukan seperti di Pulau Cangkir, Mangrove Pulau Cangkir, Cigaru, dan Tebing Koja.

"Itu sudah ada di grand desain, diharapkan juga bisa cepat dibangun. Mudah-mudahan Pj Bupati lebih perhatian ke wisata, apalagi instruksi presiden," pungkas Imam. ●pp



BANTUAN BIBIT TANAMAN TALAS UNTUK PELAKU UKM

Anggota komisi IV DPR Nuraeni (kiri) disaksikan Pj Gubernur Banten Al Muktabar (kedua kanan) menyerahkan bantuan bibit tanaman talas beneng untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Serang, Banten, Senin (6/11). Nuraeni menyalurkan bantuan dari pemerintah pusat berupa 60 ribu bibit talas beneng untuk ditanam pada lahan seluas 15 hektar guna memenuhi kuota ekspor daun talas pelaku UKM ke Amerika Serikat.

TPA Ilegal di Pondok Ranji Masih Beroperasi, Garis Polisi Dibuka-tutup

Meskipun akses jalan masuk telah dipasangi police line, hal itu tidak diindahkan oleh para pelaku pembuang sampah. Awak kendaraan-kendaraan itu membuka begitu saja garis polisi yang menghalangi setiap kali datang malam-malam.

TANGSEL (IM) - Meski telah disegel oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tempat pembuangan akhir atau TPA ilegal di Pondok Ranji ternyata masih tetap beroperasi. Kendaraan pengangkut sampah terlihat masih hilir mudik menerobos garis polisi yang ada, tak gubris adanya larangan dan segel yang telah terpasang sejak 31 Oktober lalu.

Sarmili, seorang warga sekitar TPA ilegal itu menghitungkan ada delapan kendaraan datang dan pergi setiap harinya, terdiri dari jenis truk dan mobil bak terbuka. Menurutnya, awak kendaraan-

kendaraan itu akan membuka begitu saja garis polisi yang menghalangi setiap kali datang malam-malam.

"Meskipun mulai dari akses jalan masuk telah dipasangi police line, hal itu tidak diindahkan oleh para pelaku pembuang sampah," katanya, Senin (6/11). Setelah sampah selesai dibuang, garis polisi kembali dipasang.

Kata Sarmili, sesekali warga berinisiatif mengikat garis polisi yang sudah terputus. Tetapi, tetap saja ada yang mencopotnya. Kata dia, aktivitas di TPA liar biasa didapat pada pagi dan malam. "Pagi ada yang ke

luar nanti datang lagi malam, pokoknya sehari 8 rit," katanya sambil menghitung kadang truk-truk ditemani dua mobil bak terbuka, kadang komposisinya 3 mobil pick-up dan 4 truk.

Warga tak kuasa menghadang secara langsung karena, Sarmili mengungkapkan, keberadaan kelompok yang disebutnya dari ormas "Kemarin pas ada penutupan mah ormas kagak ada yang muncul satupun," kata dia.

Sarmili berpendapat langkah penutupan TPA ilegal itu harus dilakukan pemerintah pusat. Atau, Pemerintah Kota Tangsel dimintanya mencarikan solusi TPA lain. "Jangan di sini," katanya.

Pantauan di lokasi, Senin pagi, volume sampah semakin menumpuk dari terakhir kali terlihat saat penyegelan dilakukan aparat gabungan Pemkot dan Polres Tangsel. Nampak sejumlah orang sedang memilah di tengah tumpukan sampah dan sebagian duduk di lapak semi permanen. Sisa jejak ban mobil pun masih terlihat di lokasi.

Direktur Komunitas Saba Alam Indonesia Hijau (SAIH) Foundation, Fahrul Roji, meminta pihak terkait segera menindak tegas pelaku kejahatan lingkungan di Pondok Ranji. Menurutnya, dalam menindak tegas tidak bisa dilakukan setelah-setengah. "Pemkot Tangsel cuma teriak-teriak di medsos terkait penutupan TPA liar tapi kenyataannya tuh police line buka tutup, kungan di pondok ranji," katanya.

Sekretaris Dinas Satpol PP Kota Tangerang Selatan, Sapta Mulyana membenarkan adanya aktivitas kendaraan masuk TPA ilegal yang telah disegel itu. Ia mengklaim telah melakukan pengusiran di lokasi.

Menurut Sapta, sedang dilakukan pengukuran di lokasi untuk pemasangan pagar. "Pemilik wajib menutup, memang. Kalau tidak ada upaya lain ya termasuk pemiliknya pembiaran kan," katanya.

Dalam pernyataannya pada 31 Oktober lalu, Sapta menegaskan penyegelan per-

manen dilakukan petugas Satpol PP didukung aparat kepolisian setempat diharapkan mampu menghentikan aktivitas ilegal pembuangan sampah di lokasi yang berdekatan dengan stasiun KRL Pondok Ranji tersebut.

"Jadi kami tutup akses dengan police line," kata Sapta saat itu.

Apabila pemilik atau pengelola masih membandel, dia menambahkan, nantinya akan berhadapan dengan pihak berwajib. "Kalau ada perusahaan segel itu sudah masuk pidana. Jadi nanti urusannya sama kepolisian."

Ia meyakini, dengan dilakukan penyegelan, sudah tidak ada lagi aktivitas pembuangan sampah yang kebanyakan dari luar Tangerang Selatan itu. "Sudah kami hentikan semua. Yang utama ini Dinas Lingkungan Hidup kemudian kami selalu bergerak di masyarakat berkoordinasi dengan kepolisian dan seterusnya," tutur Sapta. ●pp

Pj Bupati Tangerang Berharap Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Capai 85 Persen

TANGERANG (IM) - Pj Bupati Tangerang, Andi Oni berharap target partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Tangerang minimal mencapai 85 persen.

Hal tersebut diungkapkan Pj Andi Oni saat memberikan sambutan pada acara Kirab Pemilu 2024 yang digelar di Alun-Alun Tigaraksa Puspemkab Tangerang.

"Kami berharap target minimal dari partisipasi pemilih yang ada di Kabupaten Tangerang dari jumlah pemilih akan dapat tercapai sebanyak minimal 85 persen yaitu sekitar 2 jutaan pemilih yang akan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu di tahun 2024," katanya, Senin (6/11).

Ia sangat mengapresiasi dan mendukung penuh atas upaya yang dilakukan oleh KPU untuk mensosialisasikan Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2024 dan mengharapkan peran serta aktif masyarakat untuk dapat menyaksikan pemilu mendatang.

"Kami mengharapkan peran serta aktif dari pada seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Tangerang, agar berjalan lancar," ungkapnya.

Dia juga sekali lagi mengimbau kepada seluruh ASN dan penyeleng-

gara pemerintahan lainnya untuk bersikap netral mendukung pelaksanaan Pemilu yang tertib, aman dan damai.

Sementara itu Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU RI, Eberta Kawima mengungkapkan Kirab Pemilu yang dilaksanakan tersebut merupakan agenda nasional yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam rangka mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

"Kami semua menyelenggarakan kirab pemilu ini adalah tujuannya tentu akan memperkenalkan dan menginformasikan kepada masyarakat luas tentang pelaksanaan Pemilu pada tahun 2024 dan jangan sampai mereka tidak menggunakan hak pilihnya," katanya.

Ia menjelaskan kirab Pemilu tersebut terbagi menjadi beberapa tim kirab yang kesemuanya nantinya akan bertemu dan berkumpul di Gelora Bung Karno Jakarta untuk deklarasi bersama-sama pada tanggal 27 November 2023.

"Semoga dengan upaya dan usaha yang kita lakukan bisa mendorong partisipasi jumlah pemilih pada pemilu 2024 nanti, karena Pemilu ini adalah pemilu yang terbesar di dunia yang dilakukan secara serentak bersamaan," pungkasnya. ●pp

5 Gedung RSUD Cilegon Akan Dibongkar untuk Pembangunan Medical Center

CILEGON (IM) - Sebanyak 5 gedung di kompleks RSUD Kota Cilegon akan dibongkar. Hal itu dilakukan untuk pembangunan 5 Lantai Medical Center. Lima gedung yang dibongkar itu adalah kamar bersalin, gedung ruang bayi, gedung ruang nifas, ruang VIP dan satu gedung yang kerap berganti fungsi.

Direktur RSUD Kota Cilegon, Lendy Delyanto menjelaskan, pembangunan Medical Center RSUD Kota Cilegon saat ini sudah memasuki tahap lelang untuk tahapan pertama kegiatan konstruksi fisik.

"Sudah naik tayang di ULP Kota Cilegon," ujar Lendy, Senin (6/11).

Dilakukannya pembong-

kar sejumlah gedung itu karena tahap pertama Medical Center RSUD ini bukan di tanah kosong.

Pembongkaran itu pun menjadi bagian dari kegiatan dari penyedia konstruksi.

"Dibongkar dulu nanti dimulai dengan rencana groundbreaking dulu di tahun ini, baru nanti untuk menghadapi tahun kedua nanti baru akan lelang dini lagi rencananya untuk tahun kedua," paparnya.

Lendy memastikan pelayanan yang dilakukan di sejumlah gedung yang dibongkar itu akan tetap berjalan baik.

"Memang nanti akan ada pengurangan jumlah tempat tidur, tapi tidak akan mengurangi jumlah minimal tempat tidur rumah sakit tipe B, tetap

sesuai standar," paparnya.

Untuk tahap satu ini, anggaran yang dibutuhkan sekira Rp1,7 miliar. Rencananya, lantai satu Medical Center untuk IGD dengan kelengkapannya kamar operasi untuk tindakan darurat, lalu penunjang darurat lainnya.

Lantai dua instalasi bedah sentral. Di lantai ini akan ada kamar operasi khusus jantung dan juga catlab.

"Lantai tiga itu ICCU itu ICU khusus jantung, lalu ada HCU. Lantai empat ada kamar rawat inap kelas satu dan direncanakan untuk unit medical check up. Lantai lima ada kamar perawatan VIP dan VVIP, serta di rooftop nanti ada untuk rooftop garden dan cafeteria," papar Lendy. ●pra



BUDI DAYA BURUNG PUYUH DI GOWA

Peternak memanen telur burung puyuh (Coturnix coturnix) di Quinsha Farm, Desa Katangka, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Senin (6/11). Sebanyak 11.000 burung puyuh yang dibudidayakan ditempatkan tersebut mampu menghasilkan 9.000 butir telur setiap harinya dan dipasarkan melalui medsos ke sejumlah kota dan kabupaten Sulsel, Sulteng, Sultra, dan Sulbar dengan harga Rp32 ribu per satu rak.



PENGERUKAN SITU PENGARENGAN DEPOK

Petugas PUPR Kota Depok menggunakan alat berat saat melakukan pengerukan di Situ Pengarengan yang dipenuhi gulma eceng gondok di Depok, Jawa Barat, Senin (6/11). Pengerukan di sejumlah situ yang berfungsi sebagai daerah resapan air itu dilakukan untuk mengantisipasi banjir memasuki musim hujan di Depok.

Pemprov Banten Penuhi Tuntutan Buruh Soal Kenaikan UMP 2024

SERANG (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten janji bakal menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten tahun 2024.

Kepala Disnakertrans Banten, Septo Kalnadi mengatakan, kenaikan UMP 2024 dimungkinkan tidak akan sesuai dengan keinginan buruh. Namun kepastian presentasinya masih dalam perhitungan.

"Perkiraan saya kenaikannya mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman pekerja sampai dengan 15 persen, mungkin tidak segitu," katanya, Senin (6/11).

Ia menerangkan, hingga kini Pemprov Banten masih menunggu revisi peraturan pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Sebab PP tersebut akan menjadi acuan untuk menghitung penetapan UMP tahun 2024.

"Biasanya kalau PP itu udah keluar, dikirim ke kita itu lengkap dengan angka statistik yang menjadi acuan UMP," terangnya.

Ia menjelaskan, pertimbangan kenaikan UMP akan disesuaikan dengan kebutuhan hidup satu keluarga selama sebulan, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi.

Namun biasanya, yang menjadi acuan para buruh terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota. "Yang dipersoalkan itu adalah penetapan UMK di Kabupaten Kota, karena itu yang menjadi acuan buruh untuk mendapatkan upah minimumnya," jelasnya. ●pra